



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : BANK INDONESIA INSTITUTE

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOGA AFFANDI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 425677

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **11.285.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/155 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m2/295 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/134 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.455.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/170 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/83 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.160.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/174 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.670.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.750.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. MOBIL, BMW 320I Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. MOBIL, BYD ME-60 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	8.585.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.478.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	24.098.000.000
III. HUTANG	Rp.	1.277.637.714
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	22.820.362.286

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.